

FORKOPIMDA

Kemenkumham dari Masa ke Masa

Rizal Afif Kurniawan. - CILACAP.FORKOPIMDA.COM

Jun 24, 2024 - 18:17



CILACAP - Mengenal bagaimana sejarah kementerian hukum dan Hak asasi manusia dari masa ke masa, Senin (24/06/2024).

Kementerian Hukum dan HAM, nomenklatur awalnya adalah Departemen Kehakiman pada Kabinet Presidensial yang di pimpin oleh Presiden Republik Indonesia pertama Ir. Soekarno dan selanjutnya Prof.Dr.Mr Soepomo diangkat sebagai menteri pertama, yaitu pada tanggal 19 Agustus 1945

Sejarah mencatat bahwa keberadaan Kementerian ini sejalan dengan proses

pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) Pada sidangnya yang di ketuai oleh Ir Soekarno, dimana sebelumnya Panitia Ketijil PPKI mengusulkan supaya diadakan 13 Kementerian, masing-masing kementerian dalam negeri, kementerian luar negeri, kementerian Kehakiman termasuk juga Kedjaksaan dan urusan wakaf-wakaf, Kementerian Keuangan, Kementerian kemakmuran, Kementerian kesehatan, kementerian pengajaran, kementerian kesedjahteraan, kementerian pertahanan, kementerian penerangan, kementerian perhubungan (lalu lintas, verkeer), Kementerian urusan agama dan menteri negara (Minister zonder Portefeuille).

Jejak digital menyebutkan bahwa dinamika Kementerian Hukum dan HAM diawali pada Kabinet pertama yang dipimpin oleh Ir. Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta pada masa perang kemerdekaan (1945-1949), selanjutnya pada masa Demokrasi parlementer (1949-1959) masa Demokrasi Terpimpin (1959-1968), masa Orde Baru (1968-1996) dan masa Reformasi (1998-sekarang), dari awal pembentukan kementerian sampai saat ini telah dipimpin sebanyak 42 Menteri serta telah mengalami 5 (lima) kali perubahan nomenklatur, dengan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Departemen Kehakiman (periode tahun 1945-1999)

- Memiliki tugas pokok dan fungsi mengurus Pengadilan, Penjara, Kejaksaan, Kadaster meliputi pengelolaan hak atas tanah, nilai tanah dan pemanfaatan tanah berdasarkan Peraturan Herdeland yudie Staatblad No.576.
- Kewenangan Kementerian ini diperluas dengan bergabungnya Kedjaksaan dan Jawatan Topografi berdasarkan Maklumat. Pemerintah Tahun 1945 tanggal 1 Oktober 1945 dan Penetapan Pemerintah tahun 1945.
- Jawatan Topografi keluar dari Kementerian ini, selanjutnya dialihkan ke Departemen Pertahanan berdasarkan Penetapan pemerintah tahun 1946.
- kementerian ini memiliki susunan organisasi dan tata kerja yang menggambarkan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan pemerintah no 60 tahun 1948.
- Kedjaksaan tidak lagi menjadi bagian dari Kementerian Ini berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 204 Tahun 1960

2. Departemen Hukum dan Perundang-Undangan (periode tahun 1999-2001)

- Presiden Republik Indonesia Keempat Abdurrahman Wahid dalam susunan kabinetnya mengubah nomenklatur Departemen Kehakiman menjadi Departemen Hukum dan Perundang-Undangan.
- Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999, Unit Eselon I bertambah yakni Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan
- Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Nomor M.03-PR.07.10 Tahun 1999, terdapat penambahan 2 (dua) Direktorat Jenderal baru yakni Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

3. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (periode tahun 2001-2004)

- Presiden Republik Indonesia Kelima Megawati Soekarnoputri dalam susunan kabinetnya mengubah nomenklatur Departemen hukum dan Perundang-Undangan menjadi Departemen Kehakiman dan HAM didasari pertimbangan adanya penambahan tugas di bidang perlindungan HAM

- Berdasarkan undang-undang no 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang dipertegas kembali dalam undang-undang no 4 tahun 2004, presiden Megawati pada tanggal 23 Maret 2004 mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 21 tahun 2004 yang mengalikan organisasi, administrasi, finansial dan lingkungan Peradilan umum serta Tata Usaha Negara dan Pengadilan Agama dari kementerian ini ke Mahkamah Agung.

4. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (periode tahun 2004-2009)
Presiden Republik Indonesia Keenam Susilo Bambang Yudhoyono dalam susunan kabinetnya mengubah nomenklatur Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia menjadi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia

5. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (periode tahun 2009 sampai sekarang)

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 mengamanatkan nomenklatur Departemen berubah menjadi Kementerian, sehingga Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia berubah menjadi kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia sampai sekarang

- Tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM Indonesia saat ini diatur berdasarkan peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peringatan Hari Ulang Tahun pada masa Departemen Kehakiman semula di dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus pada setiap tahunnya, terakhir di peringati pada hari Dharma karya Dhika tanggal 19 Agustus 1982. Namun dalam dinamikanya berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI nomor : M.06-UM.01.06 Tahun 1985 bahwa tanggal 30 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kehakiman Republik Indonesia

Berdasarkan autentikasi terhadap hasil pengkajian dalam rangka hari Dharma karya Dhika th 2021 yang memuat dokumen sejarah, pendapat para Ahli hukum serta keputusan rapat pada tanggal 19 Oktober 2021, maka hari lahir kementerian Hukum dan HAM "hari Dharma karya Dhika" Di tetapkan pada tanggal 19 Agustus 1945, dan akan diperingati setiap tahunnya. Hal ini tertuang sebagaimana keputusan nomor M. HH -2. OT. 01.03 tahun 2021 yang di tandatangi oleh Menteri hukum dan HAM, bapak Yasonna H. Laoly yang sekaligus mencabut keputusan menteri Kehakiman nomor M. 06-UM.01.06 tahun 1985.